

## KARASTERISTIK PEMIKIRAN POLITIK IBN KHALDUN

**Hasaruddin**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar  
Jl. St. Alauddin No. 36 Samata Gowa

### **Abstract;**

This article aims at outlining the characteristics of Ibn Khaldun's political thought and at analyzing Ibn Khaldun's views on state leadership. Based on Ibn Khaldun's works, it clearly explains that Ibn Khaldun saw man from sociological and anthropological point of views. For him, human are not able to live without living and working with other creatures. This shows the necessity of organization for all mankind due to its function as an important factor in leading human existence to perfection.

### **Keywords;**

Politics, State, Government, Society

### **I. Pendahuluan**

Pandangan Ibn Khaldun tentang kehidupan politik perlu disimak, terutama dalam praktek politik yang sering kali terdapat di tengah-tengah kita sekarang ini. Baginya politik pada pokoknya adalah sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang kotor yang harus ditolak, atau diterima karena terpaksa saja. Politik dan kehidupan bernegara adalah sesuatu yang hanya dimiliki manusia saja.<sup>1</sup> Manusia berpolitik karena kelebihanannya dengan makhluk lain dalam alam semesta ini. Tidak ada makhluk lain yang berkehidupan politik dan berkehidupan kenegaraan, selain dari manusia. Karena itu sewajarnya apabila kehidupan politik itu dihadapi dengan segi-segi terbaik yang dimiliki manusia. Dan segi-segi terbaik itu biasanya diasosiasikan dengan moralitas yang tinggi dan kehidupan keagamaan yang luhur. Moralitas itu tinggi dan agung, karena dengan itulah manusia memanasifestasikan ketinggianya terhadap makhluk-mahluk yang lain. Agama itu agung karena ia memberikan ajaran yang paling terpuji yang dapat diterima manusia, sehingga dapat memberikan keselamatan terhadap manusia bukan dalam kehidupan dunia ini saja, akan tetapi juga menjanjikan keselamatan dalam kehidupan yang lebih kekal di akhirat nanti.

Ibn Khaldun<sup>2</sup> tidak menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan manusia dalam kehidupan politik itu, sebagaimana juga halnya dengan banyak kekuarungannya dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan untuk mencari keuntungan dan

kesenangan pribadi, dan lain-lain sebagainya, adalah juga realitas yang tidak pernah absen dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Ibn Khaldun memandang manusia dari sisi sosiologi dan antropologi, bahwa manusia tidak mampu hidup tanpa bekerja sama dengan makhluk lain. Ketidakmandirian manusia itu terutama dilihat dari dua kenyataan; pertama dari segi pemenuhan kebutuhan pokok. Kedua, dari segi pertahanan diri dari berbagai ancaman dan bahaya.

Oleh karena itu, organisasi merupakan suatu keniscayaan bagi semua manusia. Karena tanpa organisasi, eksistensi manusia tidak akan sempurna. Keinginan Tuhan hendak memakmurkan dunia dengan makhluk manusia dan menjadikan manusia di bumi sebagai Khalifah<sup>4</sup> atau pengelola alam dan isinya untuk maslahat seluruh ummat manusia. Dari latar belakang di atas, tulisan ini secara umum akan mengulas bagaimana Karakteristik Pemikiran Politik Ibn Khaldun dan bagaimana pandangan Ibn Khaldun dalam Kepemimpinan pada suatu negara.

## **II. Kondisi Sosial pada Masa Hidupnya**

Kondisi sosial semasa hidup seorang tokoh merupakan suatu hal yang memiliki kaitan erat dengan ketokohnya. Keadaan tersebut juga dialami oleh Ibn Khaldun,<sup>5</sup> karena ia tidak dapat dilepaskan dalam situasi dan kondisi di mana ia dibesarkan.

Kondisi sosial Masyarakat pada masa Ibn Khaldun merupakan masa kemunduran dan perpecahan yang merupakan konsekuensi logis dari adanya konflik yang melanda dunia Islam di Timur dan Barat. Di Afrika Utara bagian Barat yang sering disebut dengan Magrib, tempat di mana Ibn Khaldun dilahirkan dan malang melintang di dunia politik, pada abad ke-14 ditandai dengan kemandegan pemikiran, kemudian oleh kekacauan politik. Kekuasaan Muslim Arab telah jatuh sehingga banyak negara bagian melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Konflik, intrik, perpecahan dan kericuhan meluas dalam kehidupan politik dan setiap orang berupaya meraih kekuasaan<sup>6</sup>, Negara-negara di sekitar wilayah tersebut, yaitu Bijayah, Mahdiyah, dan Qal'at saling berperang dan masing-masing berupaya untuk saling mengalahkan.

Di sisi lain, Eropa mulai menampakkan tanda-tanda perubahan dan kebangkitan yang mulai muncul sejak abad ke 13-14. Abad ke-13, Eropa didominasi oleh pemikir konstruktif positif, masa para ahli teologi dan filsafat spekulatif positif.<sup>7</sup> Mereka semua percaya bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk melampaui dunia fenomena dan mencapai kebenaran metafisis.

Ibn Khaldun dilahirkan dari keluarga politisi dan intelektual sekaligus. Suatu cirri khas yang turut serta melatari corak pemikirannya. Tradisi intelektual yang telah ia warisi dari keluarganya dan lagi jalan hidupnya yang ditandai dengan berbagai macam pekerjaan dan kehidupan ilmiah telah membentuk pula kerangka berfikirnya yang realistik dan rasional. Ibn Khaldun

adalah seorang aktivis dan pemikir politik sekaligus yang telah menghabiskan seluruh umurnya dalam pertarungan dan petalangan politik dalam berbagai bentuknya di kurun waktu dan bagian dunia tempat di mana ia hidup.

Keterlibatan Ibn Khaldun di bidang p[olitik praktis saat usianya belum juga genap dua puluh tahun. Pada mulanya, ia menjabat sebagai tukang stempel surat pada pemerintahan Abu Muhammad ibn Tafrakin. Tatkala Tafrakin ditaklukan oleh Abu Zaid, salah seorang penguasa Konstantinopel, Ibn Khaldun melarikan diri dan berkerja kepada Sultan Inan di Tlemcen. Ibn Khaldun digaji oleh Ibn Inan sebagai gaji seorang sekretaris dan *muwaqqi*.<sup>8</sup> Ia mengaku menerima jabatan tersebut dengan setengah hati, karena ia menganggap kedudukan tersebut kurang setara dengan status sosial keluarganya yang turun temurun selalu menjadi orang terhormat di kerajaan.

Meskipun ia mendapat penghargaan tinggi dari sultan, namun hasratnya untuk menjadi orang besar dan disegani memaksanya untuk terjun langsung ke dalam kancah politik praktis dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menggulingkan sultan. Hal ini membuktikan bahwa ambisi politiknya telah memnuhi jiwanya meskipun ia masih muda.<sup>9</sup>

Ibn Khaldun membantu Amir Abu Abdullah Muhammad dalam meraih kembali kekuasaanya, dengan syarat kalau usahanya berhasil, ia akan diangkat sebagai perdana menteri. Namun Abu Inan mengetahui persekongkolan tersebut dan segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ibn Khaldun. Ibn Khaldun mendekam dua tahun dalam penjara, dan selama itu, ia berkali-kali memohon ampun kepada sultan untuk membebaskannya. Menjelang kematiannya, sultan berjanji membebaskannya. Setelah bebas dari penjara Ibn Khaldun mendukung Abu Salim yang pada tahun 1359 M, menjadi penguasa Maroko dan mengangkat Ibn Khaldun sebagai sekretaris negara dan penasehatnya.

Pada tahun 1362, Ibn Khaldun bergabung dengan pemerintahan Mohammad V dari Granada. Pemerintahan Mohammad berakhir setelah ditaklukan dan dibunuh oleh sepupunya Abu al-Abbas. Ibn Khaldun datang menyambut kemenangan Abbas dan kemudian Ibn Khaldun diberikan kedudukan di daerah Bijayah. Ibn Khaldun bertahan pada kedudukannya, hingga kemudian ia merasa bahwa pemerintah sudah tidak mempercayainya lagi dan arena itu ia memutuskan untuk berangkat ke Bashrah. Di sana ia dipanggil oleh Amir Abu Hamu untuk menjadi perdana menteri di Tlecemen, namun Ibn Khaldun menolak dan mengajukan saudaranya untuk menduduki posisi tersebut.

Kehidupan politik Ibn Khaldun yang cenderung selalu berubah dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain menunjukkan ambisi dan hasrat besarnya dalam bidang tersebut. Ia merasa tidak harus malu dengan sikapnya yang berubah-ubah dan sanjungan diplomatisnya, karena semua orang tidaklah bersikap tetap dan semuanya bersalah, baik dalam satu hal

maupun dalam hal lainnya. Baginya, tidaklah jahat orang yang bersalah, selama tetap mengikuti hukum sosial.

Hal ini dikomentari oleh Schmidt bahwa ia dengan mudah mengubah kesetiiaannya, meninggalkan seorang tuan dan mengabdikan kepada tuan yang lainnya, dengan lihai ia memanfaatkan keberhasilan mereka. Ia benar-benar berpengalaman bagaikan seorang diplomat masa kini. Karena politik merupakan pekerjaan yang berbahaya.... Ibn Khaldun tidak salah pilih dengan bidang ini, itu kelihatannya suatu pernyataan yang tidak langsung, bukan hanya kecerdasan dan muslihat, rasa hormat dan kedermawanan tetapi juga tipu muslihat dan penyogokan. Sajak-sajak, surat-surat, dan karya-karya sejarahnya menunjukkan betapa sempurna ia memperlihatkan seni tipu dayanya, halus dan menjebak atau menjengkelkan atau menyenangkan, tergantung lingkungan. Hal itu sudah sangat biasa dilakukan dan dianggap begitu bermanfaat, sehingga kadang-kadang ia tidak menyadari bahwa hal itu dapat menimbulkan akibat yang tidak baik pada dirinya. Sejauhmana ia mengetahui perbedaan antara anugerah yang diberikan secara logis sebagai perwujudan dari rasa prihatin, perhatian, atau pengikut dan pemberian atau hadiah, dianggap belum begitu jelas dalam dunia politik, hal itu merupakan persoalan yang masih kabur untuk dipertanyakan.<sup>10</sup>

Hal ini senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa bidang politik lebih luas dari bidang hukum, sehingga seorang politikus terkadang tidak selalu mempergunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan, melainkan ada kalanya melakukan sesuatu yang secara nyata melanggar hukum.<sup>11</sup>

### **III. Karakteristik Pemikiran Politik Ibn Khaldun**

Dalam hal kepemimpinan, Ibn Khaldun tidak menggunakan pendekatan keagamaan, tetapi lebih menekankan pada pendekatan sosial dan budaya. Ia menolak menghubungkan soal kepemimpinan dengan syari'ah, karena menurutnya bahwa eksistensi manusia itu dapat saja ada tanpa kepemimpinan agama. Di satu pihak, dalam kenyataannya agama jarang menjadi sentral pemikiran manusia, di pihak lain, negara-negara yang tidak beragama Islam jumlahnya jauh lebih banyak.<sup>12</sup> Hal ini berangkat dari fenomena kehidupan pada masanya, di mana orang-orang Majusi adalah mereka yang tidak menganut agama Samawi pada umumnya dan mereka tidak memiliki kitab suci yang diturunkan dari Allah, tetapi mereka memiliki Negara yang besar dan meninggalkan sejarah yang membanggakan. Dengan demikian, bahwa kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat itu tidak mesti berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah, tetapi merupakan suatu kemestian hidup, manusia bermasyarakat, terlepas dari kenyataan apakah mereka menganut agama samawi atau bukan. Hal ini juga berangkat dari fenomena bangsa Eropa yang pada abad ke 14 melakukan sentralisasi kekuasaan pada tangan raja-raja tanpa adanya campur tangan gereja,<sup>13</sup> yang

kemudian negara-negara tersebut menjadi cikal bakal Negara nasional yang kuat yang kemudian menjadi cirri bentuk Negara di Eropa.<sup>14</sup>

Dalam pandangan Ibn Khaldun, wahyu Allah bukanlah merupakan kodrat dan tidak diperlukan dalam organisasi politik pada sebuah Negara. Kekuasaan politik tetap ada meskipun tanpa hukum-hukum Allah.<sup>15</sup> Pernyataan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pendapat Ibn Sina dan al-Farabi yang mengatakan bahwa wahyu dan hukum bersifat kodrati dan diperlukan bagi organisasi politik.<sup>16</sup>

Ketika berbicara tentang kepemimpinan seorang pemimpin dalam kemasyarakatan, Ibn Khaldun mengatakan hal itu dapat ditegakkan dengan salah satu dari dua cara; yakni solidaritas dan factor endogen sang pemimpin. Agama dan politik bila beriringan akan memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan integritas social. Sebaliknya, bila tidak beriringan maka kekuatannya akan sirna, karna *almulk* ditimbulkan oleh superioritas yang timbul karna solidaritas dan pertolongan Allah untuk menegakkan agama.<sup>17</sup>

Motivasi agama untuk mencapai kemenangan itu menyebabkan teratasinya segala perselisihan, sehingga terhindar dari perpecahan. Hal ini merupakan realitas social yang merupakan sifat kodrati manusia yang mutlak diperlukan bagi eksistensi bangsa.<sup>18</sup> Dari sini terlihat adanya suatu sikap yang kontroversial pada Ibn Khaldun, tetapi pada dasarnya, Ibn Khaldun tidak memihak agama dalam pengertian sempit, tetapi menuju agama dalam arti yang lebih luas yaitu sunnatullah.

#### IV. Konsep Pemikiran Ibn Khaldun tentang Kepemimpinan dalam Islam

Berbicara tentang pemikiran politik Ibn Khaldun dalam hal kepemimpinan, ini terbagi menjadi :

1. Negara: Suatu bentuk organisasi
2. Keharusan mendirikan lembaga kepemimpinan
3. Kualifikasi pemimpin
4. Cara pengangkatan pemimpin
5. Hubungan antara pemimpin dan rakyat
6. Pola kepemimpinan rakyat

Berikut dijelaskan secara terperinci;

##### 1) Negara

Menurut Ibn Khaldun, negara mempunyai keterkaitan erat dengan peradaban, keduanya bertalian erat dan saling mengisi. Suatu negara tanpa peradaban sukar untuk dibayangkan bagaimana wujudnya. Sebaliknya peradaban tanpa negara adalah tidak mungkin karena hal itu bertumpu pada naluri manusia untuk bekerja sama.

Keberadaan suatu negara didukung dan ditentukan oleh solidaritas, karena inti suatu negara adalah solidaritas. Untuk menjelaskan bagaimana berlakunya solidaritas dalam masyarakat dan pembentukan negara, Ibn Khaldun mengangkat contoh Negara-negara pra Islam maupun sesudah Islam,

di mana Byzantium, Persia, dan Arab muncul kemudian hancur karena unsur solidaritas dalam negara tersebut.

Kebiasaan mereka setelah suatu negara berdiri teguh, ia bisa saja menyingkirkan ashabiyat dan orang cenderung melupakan masa-masa awal berdirinya suatu negara. Karena keluarga secara turun temurun menjadi pemimpin yang diakui dan dipatuhi, maka mereka merasa sudah tidak lagi membutuhkan ashabiyat untuk mempertahankan negara mereka.

Dalam pandangan Ibn Khaldun tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan dibagi menjadi dua:

1. Al-Mulk al-Thabi'iy: Negara dengan ciri kekuasaan alamiah. Ciri negara ini biasanya sang pemimpin berlaku sewenang-wenang dan cenderung dictator, sehingga prinsip keadilan diabaikan, yang terpenting hanya keunggulan dan kekuatan.

2. Al-Mulk al-Siyaasiy: Negara dengan cirri kekuasaan politik. Negara ini terbagi menjadi:

a. Negara hukum (*siyasah diniyah*), adalah Negara yang menjadikan syariah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Dengan demikian Negara semacam ini di samping berkarakteristik al-Quran dan hadis, juga menempatkan akal manusia dalam perannya yang sangat urgen dalam kehidupan bernegara. Tipe ini merupakan satu-satunya bentuk tata politik dan cultural yang permanen.<sup>19</sup>

b. Hukum Sekuler (*Siyasah aqliyah*), adalah Negara yang hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu.

c. Republik ala Plato (*siyasah Madaniyah*), dalam Negara ini segelintir orang elit duduk sebagai penguasa memerintah atas segolongan budak-budak.

## 2)Keharusan Mendirikan lembaga Kepemimpinan

Hal yang mendasari alasan Ibn Khaldun adalah bahwa manusia mempunyai sifat ingin memiliki, merampas dan menguasai milik sesamanya. Untuk itu manusia memerlukan sebuah kepemimpinan yang bisa mengendalikan kehendak mereka dan membuat aturan-aturan tertentu untuk kebaikan mereka.

Selain itu perintah Tuhan yang termaktub daam surat al-Israa (17): 33<sup>20</sup> dan surat Huud (11): 61,<sup>21</sup> yang menetapkan manusia untuk menjadi khalifah dan menganjurkan untuk memakmurkan bumi.

## 3) Kualifikasi Pemimpin

Jabatan pemimpin politik merupakan jabatan yang penting dan menentukan. Dikatakan penting karena masyarakat manusia memerlukan panata untuk mengatur hubungan antar manusia karena masing-masing memiliki kekuatan untuk saling berperang. Karena itu berarti bahwa masyarakat manusia memerlukan pemimpin yang akan melaksanakan kekuasaan, mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dari sifat

agresifitas. Maka pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.<sup>22</sup>

Sebenarnya arti kepemimpinan bagi Ibn Khaldun adalah supervisi terhadap kepentingan Negara muslim baik yang berkenaan dengan persoalan agama maupun keduniaan.<sup>23</sup> Untuk itu seorang pemimpin menurut Ibn Khaldun adalah:

1. Harus berasal dari kalangan sendiri,
2. Mempunyai kemampuan menguasai warganya ,
3. Mempunyai kekuatan, kewibawaan serta kewenangan. Dan inilah yang disebut al-Mulk.<sup>24</sup>

Di samping itu, persyaratan seorang pemimpin adalah:

1. Berilmu pengetahuan,
2. Bersifat adil,
3. Kafayat (mampu), dalam hal ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, mampu memobilisasirakyat, mampu mengendalikan politik kenegaraannya, mampu berdiplomasi dan lain sebagainya.
4. Sehat jasmani dan rohani.

#### 4) Cara Pengangkatan

Dalam fiqhi siyasa disebutkan bahwa pengangkatan seorang pemimpin bisa menggunakan salah satu dari dua prosedur yaitu:

- a. Penunjukan dari pemimpin terdahulu kepada seseorang yang dipercaya untuk menjadi penggantinya.
- b. Bai'at wakil-wakil umat jika para wakil rakyat mempunyai pendapat yang berbeda tentang calon pemimpinnya.

#### 5) Hubungan antara Pemimpin dan Rakyat

Seandainya pemimpin tidak ada, kehidupan manusia akan berada dalam kondisi kacau balau dan penuh dengan situasi anarki yang pada akhirnya mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Jadi pemimpin bukanlah seseorang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, akan tetapi seseorang yang melakukan suatu tugas social yang penting yang tujuannya berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia. Bagi Ibn Khaldun kekuasaan itu adalah hubungan itu sendiri:

Ketahuilah bahwa kepentingan rakyat kepada pemimpin bukan pada diri dan tubuhnya, seperti keelokan badannya, kebesaran tubuhnya, keluasan ilmu pengetahuannya dan ketajaman otaknya. Kepentingan mereka itu terletak dalam hubungan antara dia dan mereka. Karena itu kekuasaan dan pemimpin itu hal yang bersifat relasional, jadi terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak. Ia dinamakan pemimpin karena mengurus persoalan rakyat. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai rakyat dan rakyat adalah orang yang mempunyai pemimpin.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa seorang pemimpin sebaiknya harus memiliki *ghalabah*, sultan dan kewenangan untuk melakukan kekerasan. Namun Ibn Khaldun cenderung berpendapat bahwa seorang pemimpin harus kharismatik. Karena itu sikap seorang pemimpin:

1. Perhatiannya harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, hal ini seperti pepatah pujangga Jawa: *gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja*.<sup>26</sup>

2. Harus mengawasi system kerja aparatnya dan selalu mempunyai informasi tentang mereka.

3. Seorang pemimpin harus selalu terbuka dalam hal menerima keluhan rakyatnya dan berusaha memenuhinya.

4. Seorang pemimpin merasa bahwa kekuasaan itu merupakan suatu beban yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Jadi, seorang pemimpin menurut Ibn Khaldun adalah seseorang yang menganggap kekuasaannya sebagai amanah dari Allah, sehingga pelaksanaan kekuasaannya dianggap tidak lain sebagai cara terbaik pengabdian kepada Tuhan.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik benang merah bahwa, pertama, pemikiran politik Ibn Khaldun timbul karena berangkat dari kondisi social pada masa kehidupannya yang sedang mengalami kemunduran dan perpecahan. Kedua, Ibn Khaldun berpendapat bahwa kehancuran dan perpecahan tersebut karena pada dasarnya manusia memiliki sifat ingin selalu memiliki, merampas dan menguasai milik sesamanya. Untuk itu perlu adanya pemimpin yang dapat mengendalikan mereka. Ketiga, arti kepemimpinan bagi Ibn Khaldun adalah supervise terhadap kepentingan Negara muslim, baik yang berkenaan dengan persoalan agama maupun keduniaan, maka seorang pemimpin haruslah seseorang yang mempunyai *ghalabah*, sultan dan wewenang. Keempat, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang sadar bahwa suatu saat pertanggungjawabannya akan dipertanyakan di hadapan Tuhan.

## V. Penutup

Politik dalam pemikiran Ibn Khaldun merupakan suatu hal yang mulia dan terhormat, yang hanya dimiliki oleh manusia saja, sebagai mahluk Tuhan yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini suatu mahluk lain yang berpolitik, sebagaimana halnya yang terdapat di kalangan manusia. Karena itu hendaknya politik itu dihadapi dan didekati manusia dengan segi-segi terbaik yang dimiliki dirinya, bukan dengan segi-seginya yang terburuk. Segi-segi yang terburuk itu adalah apa yang dinamakan oleh Ibn Khaldun dengan sisa-sisa kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Selanjutnya tugas manusia dalam bernegara adalah mesti berbuat dalam bentuk yang sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama dan pembangunan dunia.

### Endnotes

<sup>1</sup> A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibn Khaldun* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), h. xv

<sup>2</sup> Ibn Khaldun merupakan seorang sejarawan, politikus, sosiolog, ekonom, bahkan filosof. Dalam bidang politik, ia telah member kontribusi yang amat berarti kepada umat Islam dengan ide-ide politiknya yang mengarah kepada pembentukan organisasi politik yang mengarah kepada pembentukan negara. Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, terj. Mansuruddin (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), h. 9

<sup>3</sup> Menurut Ibn Khaldun, salah satu dari kekurangan manusia adalah memiliki naluri menguasai, merampas milik saudaranya sesama manusia. Penindasan dan eksploitasi semacam ini mengandung potensi anarkis dalam masyarakat, dimana tindakan anarkis tersebut dapat menghancurkan sesama umat manusia. Rahman, *Kekuasaan.....op. cit.*, h. 7

<sup>4</sup> Istilah khalifah itu pertama kali muncul di Arabia pra Islam, dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 M. Di situ kata khalifah tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Kata khalifah muncul dua kali dalam Alquran. Yang pertama mengacu kepada Adam Q.S . 2: 28, dan kedua mengacu kepada Daud Q.S 38: 28. Yang kedua ini muncul dalam konteks yang membawa kesan yang kuat mengenai kedaulatan. Kata khalifa juga muncul beberapa kali dalam Alquran dalam dua bentuk pluralnya, yakni khulafa, dan khalai'if. Kedua bentuk plural ini muncul dalam konteks-konteks di mana keduanya dapat diterjemahkan menjadi "para pengganti", kadang-kadang "para ahli waris, "para pemilik" atau bisa juga menjadi "raja-raja muda". Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*. Penerj. Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 61

<sup>5</sup> Nama lengkap Ibn Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibn Muhammad ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Khaldun al-Tunisi al-Hadrany. Ia dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1332 M. dan meninggal dunia di Mesir pada 1406 M. DEPAG RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: DEPAG, 1993), h. 388

<sup>6</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Terj. A. Thaha (Jakarta: Temprin, 1986), h. 289

<sup>7</sup> Frederich, *A History of Philosophy* (London: Press Limited, 1953), h. 1

<sup>8</sup> *Muwaqqi'* adalah penulis instruksi-instruksi dan pernyataan-pernyataan sultan dengan kata-kata yang ringkas dan sederhana, kadang disebut juga dengan *tauqi'*, Khudary Zaenab, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, terj. A. Rafi Ustmani (Bandung: Pustaka, 1987), h. 11

<sup>9</sup> Mukti Ali, *Ibn Khaldun dan Asal-usul Sosiologi* (Yogyakarta: Nida', 1979), h. 22

<sup>10</sup> N. Schmidt, *Ibn Khaldun: Historian, Sociologist, and Philosopher* (New York: Columbia University Press, 1930), h. 43

<sup>11</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Jakarta: Eresco, 1981), h. 8

<sup>12</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimat al-Allamat Ibn Khaldun* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra), h. 93

<sup>13</sup> Dalam Islam klasik, tidak ada pemisahan antara "Gereja" dan negara. Dalam dunia Kristen keberadaan dua otoritas ini sudah dimulai sejak masa pendiri agama ini, yang membiarkan para pengikutnya untuk menyerahkan kepada Kaisar segala sesuatu yang menjadi milik Kaisar dan kepada Tuhan segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Sepanjang sejarah dunia Kristen, selalu saja ada dua kekuasaan: milik Tuhan dan milik Kaisar. Kedua kekuasaan itu diwakili di dunia oleh gereja dan negara. Keduanya mungkin bersatu, tetapi mungkin bisa juga terpisah, boleh jadi dalam harmoni, boleh jadi juga dalam konflik; yang satu boleh mendominasi, yang lainnya juga bisa; yang satu boleh turut campur, yang lain boleh protes, seperti yang dewasa ini kita saksikan. Tetapi selalu ada dua kekuasaan itu: yang temporal dan yang spiritual. Keduanya memiliki hokum dan yurikdisinya sendiri, maupun struktur dan hirarkinya sendiri. Sebelum terbaratkan, dalam Islam tidak ada dua kekuasaan ini. Yang ada hanya satu., Kata Pengantar Azyumardi Azra dalam Bernard, *Bahasa..... cit.*, h. 3

- <sup>14</sup> Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History, A Study in the Philosophy Foundation of the Science Culture* (Chicago: University Press, 1971), h. 168
- <sup>15</sup> Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History, a Studi in the Philosophi Foundation of the Science Culture*, Chicago: Univ. Press, 1971), h. 204-209.
- <sup>16</sup> M. Sastrapratedja, *Pokok-pokok Pandangan Ibn Khaldun Mengenai Kekuasaan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1977), h. 99
- <sup>17</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimat al-Allamat Ibn Khaldun I*, (Kairo: al-Maktabah al- Tijariyat al-Kubra, t.th.), h. 322-323
- <sup>18</sup> F. Rosenthal, *The Muqaddimah I*, (New York: Panther Book, 1958), h. 92
- <sup>19</sup> S. Waqar Husaini, *istem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 217
- <sup>20</sup> Terjemahan dari surat al-Israa ayat 33 berbunyi: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah member kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*
- <sup>21</sup> Terjemahan dari surat Huud ayat 61 berbunyi: *Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, ...*
- <sup>22</sup> Miriam Budiharjo, *Aneka Pikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 9
- <sup>23</sup> Ibn Khaldun, *Op. Cit*, h. 210
- <sup>24</sup> F. Rosenthal, *Op. Cit*, h. 123.
- <sup>25</sup> F. Rosenthal, *Op. Cit*. h. 382-383
- <sup>26</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 31.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. *Ibn Khaldun dan Asal-usul Sosiologi*, Yogyakarta: Nida', 1979.
- Baali, Fuad, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, terj. Mansuruddin, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- DEPAG RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: DEPAG, 1993.
- Frederich, *A History of Philosophy*, London: Press Limited, 1953.
- Husaini, S. Waqar. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka Salman, 1983.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimat al-Allamat Ibn Khaldun*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Lewis, Bernard., *Bahasa Politik Islam*. Penerj. Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Mahdi, Muhsin. *Ibn Khaldun's Philosophy of History, a Studi in the Philosophi Foundation of the Science Culture*, Chicago: Univ. Press, 1971.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-asa Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: Eresco, 1981.

N. Schmidt, N. *Ibn Khaldun: Historian, Sociologist, and Philosopher*, New York: Columbia University Press, 1930.

Sastrapratedja, *Pokok-pokok Pandangan Ibn Khaldun Mengenai Kekuasaan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1977.

Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, Jakarta: PT Gramedia, 1992.

Khudary Zaenab, Khudary. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, terj. A. Rafi Ustmani, Bandung: Pustaka, 1987.